

Penanggulangan Korupsi Butuh Langkah Luar Biasa

Jakarta, BERKAT.

Penanggulangan korupsi disebut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar akan membutuhkan langkah-langkah yang luar biasa yang dibutuhkan mulai dari tingkat pusat hingga daerah. "Penanggulangan korupsi ini tidak dapat dilakukan dengan langkah-langkah biasa saja tapi butuh langkah-langkah diluar norma yang biasa. Artinya butuh terobosan," kata Muhaimin usai konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2011 di Jakarta, Rabu.

Langkah terobosan itu dicontohkan Muhaimin seperti penyempurnaan peraturan pengawasan dan pengelolaan keuangan negara. Selain itu, khusus untuk Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, karena ada anggaran yang dikelola terpisah oleh pusat dan daerah, maka dibutuhkan juga langkah terobosan untuk koordinasi antar pusat dan daerah. "Langkah-langkah luar biasa itu diharapkan dapat muncul dalam konferensi semacam ini," ujarnya. Konferensi Nasional Pemberantasan Korupsi Bidang Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian 2011 itu berlangsung selama 7-9

Juni dan akan menghadirkan pembicara dari BPK, Kejaksaan Agung, Kementerian PAN, Polri dan BPKP.

Selama ini, Kemenakertrans disebut Muhaimin telah berusaha meningkatkan sistem Pengendalian Intern (SPI) dilingkungan Kemenakertrans dan meningkatkan peran aparat pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang diukukan oleh Inspektorat Jenderal maupun pengawasan eksternal dari BPK dan masyarakat. "Saya harap para penanggung jawab anggaran baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota untuk menyatukan komitmen dalam mencegah korupsi, sesuai dengan

Strategi Nasional dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi (Stranas-PK) 2010-2015," kata Muhaimin dalam sambutannya.

Kemenakertrans juga menargetkan laporan keuangan tahun 2010 akan mendapatkan opini yang lebih baik daripada opini "Wajar Dengan Pengecualian" (WDP) yang didapatkan untuk laporan keuangan 2009. "Kita berharap mudah-mudahan dapat meningkat menjadi 'Wajar Tanpa Pengecualian' (WTP), paling tidak kita bisa mempertahankan opini 'Wajar Dengan Pengecualian' (WDP) seperti tahun 2008 dan 2009," ujarnya. (ant)